

SISTEM POLITIK DAN PEMILU DI INDONESIA

Darma Djufri

Program Studi Komunikasi Politik - Pascasarjana Universitas Paramadina

ABSTRAK

The general election in Indonesia has gone through several stages, starting from the election stages in the old order era, the new order era and the reform era. The political system held in elections is open, honest and fair. This research uses descriptive qualitative analysis through David Easton's theory. The presence of multiparty in the implementation of elections also colored the contestation of democratic parties held in Indonesia. The output of the series of elections is to elect a leader of a state with integrity and who has one common goal, namely to achieve equitable distribution of prosperity and development for all Indonesian people.

Keyword : General Election, Political System, Indonesia

PENDAHULUAN

Indonesia adalah bangsa yang besar dan tidak perlu diragukan lagi kebenarannya. Tetapi fakta bahwa banyak masyarakat yang justru merasa tertindas oleh pemerintahannya sendiri. Masalah ketidakadilan pemerintah menjadi persoalan yang memicu disintegrasi bangsa karenanya sistem politik Indonesia diharapkan merupakan penjabaran nilai-nilai luhur pancasila dalam keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan, dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Selama era orde lama sampai reformasi, kehidupan politik di tandai dengan ketidakpastian di tingkat massa, dan konflik politik yang tinggi di tingkat elit. Oleh karena itu, proses sosialisasi politik merupakan sesuatu yang tergarap secara baik dan teroganisir. Hal ini di sebabkan karena elit-elit politik dan elit-elit strategis terjebak dalam proses adu kekuatan yang melibatkan massa. Kasus terpenting dari hal ini adalah terjadinya berbagai bentrokan Mahasiswa dengan massa dan aparat. Kasus Trisakti dan Semanggi, setidaknya dapat dianggap sebagai refrensentasi lemahnya sosialisasi pada pasca orde baru.

Sistem politik di Indonesia dibangun dengan tujuan mewujudkan cita-cita bangsa dan nasional yang berdasar pada pancasila dan UUD sebagai dasar negara. Dalam penyelenggaraan politik negara, perlu mendayagunakan segala kemampuan aparatur negara, dimana hal tersebut membutuhkan sumber daya manusia yang terampil dan memiliki kemampuan serta membutuhkan finansial guna tercapainya tujuan nasional sesuai dengan amanat UUD 1945.

KERANGKA TEORITIS

Pengertian sistem politik menurut David Easton

Sistem adalah sekumpulan objek yang berbeda-beda yang saling berhubungan, saling bekerjasama dan saling mempengaruhi satu sama lain serta terikat dengan rencana yang sama untuk mencapai tujuan tertentu dalam lingkungan yang kompleks. Sedangkan politik merupakan interaksi antara masyarakat dengan pemerintah dalam pembuatan keputusan dan kebijakan tentang kebaikan bersama dalam suatu wilayah tertentu.

Politik berasal dari kata polis yang berarti *city state* kemudian berkembang menjadi politik, police, policy. Menurut Harold Laswell, politik adalah *who gets what, when, and how*. Menurut David Easton, politik adalah alokasi nilai-nilai secara sah dan sesuai dengan kewenangan. Menurut G.E.G Catlin, politik adalah kekuasaan dan pemegang kekuasaan. Menurut Joyce Mitchell, politik merupakan pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum untuk masyarakat seluruhnya. Menurut Jack Plano et.al, politik adalah seni memerintah, seni untuk melakukan sesuatu yang mungkin, penggunaan pengaruh, perjuangan kekuasaan dan persaingan alokasi nilai-nilai dalam masyarakat (Budiardjo, 1991).

David Easton adalah salah satu ilmuwan yang telah berupaya membangun ilmu politik yang sistematis melalui dua tahap. Pertama, melalui tulisan ilmiahnya “*The Political Sistem*” ia menyatakan betapa perlunya suatu teori umum dalam ilmu politik. Kedua, dalam tulisan ilmiah lainnya “*A Framework for Political Analysis*” dan “*A Sistem Analysis of Political Life*” ia mulai memperkenalkan konsep serta mencari konsep yang mendukung tulisan sebelumnya, untuk kemudian mencoba mengaplikasikan ke dalam kegiatan politik yang konkret atau praktis. Ketiga, Dalam hal ini Easton telah menggariskan kerangka berpikir dasar untuk mengkaji sistem politik. Kerangka pikir Easton bersifat adaptif dan fleksibel, karena itu dapat digunakan oleh aneka struktur masyarakat maupun politik. Teori Easton tersebut dimungkinkan dapat diaplikasikan secara improvisasi oleh para penggunanya dalam melakukan penjelasan atas fenomena sistem politik.

Easton menafsirkan istilah politik sebagai proses alokasi nilai dalam masyarakat secara otoritatif. Pengertian politik sebagai alokasi nilai yang bersifat otoritatif ini menandai dua tahap pembentukan teori sistem politiknya. Perhatian pada nilai sebagai komoditas yang dinegosiasikan di dalam masyarakat merupakan titik awal berlangsungnya suatu proses politik.

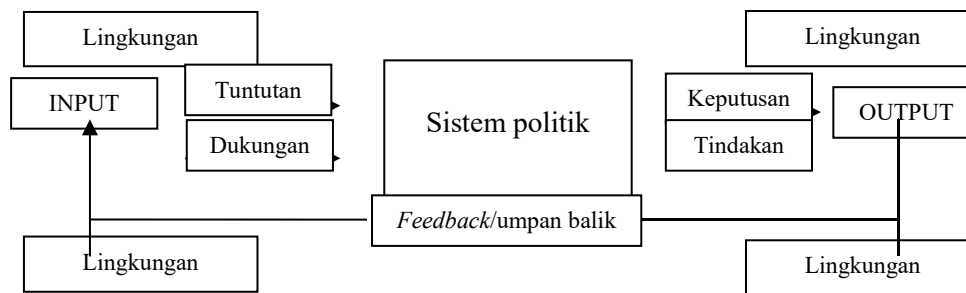
Sementara itu, Easton menyatakan ada 4 (empat) ciri atribut sistem politik, yaitu :

1. Unit-Unit dan batasan-batasan suatu sistem politik
Unit-unit ini adalah lembaga-lembaga yang bersifat otoritatif untuk menjalankan sistem politik seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, lembaga masyarakat sipil dan sejenisnya. Unit- unit ini bekerja di dalam batasan sistem politik, misalnya cakupan wilayah negara atau hukum, wilayah tugas, dan sebagainya.
2. *Input-output*
Input merupakan masukan dari masyarakat ke dalam sistem politik. yaitu berupa tuntutan dan dukungan. *Output* adalah hasil kerja sistem politik yang berasal baik dari tuntutan maupun dukungan masyarakat.
3. Diferensiasi dalam sistem
Sistem yang baik haruslah memiliki diferensiasi (pembeda/pemisah) kerja. Dimasa modern adalah tidak mungkin dalam satu lembaga menyelesaikan semua masalah. Dan membutuhkan dukungan dari lembaga lain agar semua program dapat terealisasi dengan tepat waktu.
4. Integrasi dalam sistem
Integrasi adalah keterpaduan kerja antar unit yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Unit-unit dalam sistem politik menurut Easton adalah tindakan politik (*political action*), misalnya pembuatan UU, pengawasan DPR terhadap presiden, tuntutan elemen masyarakat terhadap pemerintah, dan sejenisnya.

Sistem politik menurut David Easton terdiri dari sejumlah lembaga-lembaga dan aktifitas politik dalam masyarakat dan berfungsi mengubah tuntutan tuntutan (*demand*), dukungan-dukungan (*support*) dan sumber (*resources*) menjadi keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang bersifat otoritatif (sah dan mengikat) bagi seluruh anggota masyarakat. Dengan formulasi lain, sistem politik terdiri dari :

- Sub sistem masukan (*inputs*), terdiri dari tuntutan-tuntutan, dukungan atau sumber-sumber
- Sub sistem proses (*withinputs*), proses mengubah masukan menjadi keluaran, atau disebut juga konversi atau kotak hitam
- Sub sistem lingkungan (*environment*), yaitu faktor-faktor dari luar yang mempengaruhi sistem politik seperti sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, keamanan, geografis dan seterusnya
- Sub sistem umpan balik (*feedback*), yaitu dampak dari pelaksanaan keputusan atau kebijakan baik yang positif ataupun negatif dimanfaatkan oleh sistem politik (Maksud, 2013).

Model Sistem politik pada prinsipnya merupakan proses siklus (melingkar), yaitu dari masukan (*input*) → diproses menjadi keluaran (*output*) → ada dampak kebijakan menjadi umpan balik (*feedback*) → yang akan diserap oleh masukan (*input*) → untuk proses selanjutnya.



Gambar : Skema kerja Sistem Politik menurut David Easton

Pengaruh lingkungan, selain sebagai masukan-masukan (*inputs*), juga akan mendorong munculnya tuntutan-tuntutan yang secara langsung dapat ditransformasikan ke dalam sistem politik. Sebaliknya, karena pengaruh lingkungan pula berbagai tuntutan bisa mati (tidak berfungsi) sehingga tidak dapat diteruskan ke dalam sistem politik. Selain itu, pengaruh lingkungan pada proses konversi (*withinput*) adalah ikut mewarnai kuantitas dan kualitas keluaran atau kebijakan yang akan dihasilkan. Dalam hal ini, pengaruh lingkungan bisa memperlancar atau menghambat proses konversi yang pada akhirnya juga akan berpengaruh terhadap keluaran (*outputs*) sistem politik tersebut.

METODE

Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Unit analisis penelitian adalah sistem politik di Indonesia dari masa orde lama, orde baru dan masa reformasi. Analisis mengacu pada perubahan sistem politik di Indonesia serta melihat perkembangan jumlah partai pemilu yang telah berkompetisi dari masa ke masa.

DISKUSI

Sistem pemilihan umum (Pemilu)

Pemilu memiliki hubungan yang erat dengan negara demokrasi dan negara hukum. Inti dari demokrasi adalah keterlibatan rakyat dalam pembentukan dan penyelenggaraan pemerintah melalui partisipasi, representasi dan pengawasan. Salah satu ciri demokrasi dikemukakan oleh N. D. Arora dan S.S Awasthy adalah bahwa pemerintah harus bertanggungjawab kepada yang diperintah, pemerintah harus dipilih oleh yang diperintah atau setidaknya tidaknya dari wakil dari yang diperintah. Secara lebih tegas A. Appadorai menyatakan bahwa sarana utama rakyat menjalankan kedaulatannya adalah melalui suara dan pemilu (Gaffar, 2013).

Sistem pemilu dari era orde lama sampai pada reformasi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dalam prakteknya, yang sering menjadi permasalahan adalah bukan pada sistem pemilu yang dipilih, tetapi lebih pada proses pelaksanaan pemilu mulai dari penentuan calon, kepanitiaan, saksi, kampanye dan rekapitulasi perhitungan suara. Selain persoalan sistem pemilu, hal lain yang mendapat perhatian karena terkait hak asasi manusia adalah penentuan hak pilih. Sampai saat ini, ketentuan hak pilih dalam pemilu yang dilaksanakan pada bulan April 2019 masih menjadi topik yang alot dan menjadi polemik bagi penyelenggara pemilu.

Proses politik di Indonesia mengisyaratkan adanya perubahan kapabilitas sistem. Kapabilitas sistem dalam hal ini adalah kemampuan sistem untuk menghadapi kenyataan dan tantangan. Menurut ahli politik Aristoteles dan Plato dan diikuti oleh teori liberal abad ke-18 dan 19 melihat prestasi politik dari sudut moral. Sedangkan pada masa modern sekarang ahli politik melihatnya dari tingkat prestasi (*performance level*) yaitu seberapa besar pengaruh lingkungan dalam masyarakat, lingkungan luar masyarakat dan lingkungan internasional. Pengaruh ini akan memunculkan perubahan politik. Adapun pelaku perubahan politik bisa dari elit politik, atau dari kelompok infrastruktur politik dan dari lingkungan internasional. Perubahan tersebut adalah berupa *input* dan *output* seperti pada bagan diatas. Proses mengkonversi *input* menjadi *output* dilakukan oleh penjaga gawang (*gatekeeper*).

Rekrutmen politik berkaitan erat dengan karir politik seseorang. Melalui karier politik tersebut, orang yang bersangkutan diharapkan dapat menjalani proses seleksi untuk mengisi lowongan dalam jabatan politik dan pemerintahan. Rekrutmen politik dilakukan secara terbuka maupun tertutup. Secara terbuka, artinya rekrutmen politik tersebut ditujukan kepada semua warga negara yang memenuhi syarat yang telah ditentukan. Sebaliknya, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat direkrut untuk menduduki suatu jabatan politik dalam sistem rekrutmen tertutup. Individu yang direkrut biasanya yang memiliki hubungan cukup erat dengan penguasa atau elite berdasarkan persamaan darah, kedekatan suku, agama ataupun ideologi.

Perjalanan pemilu dari era orde lama, orde baru dan masa reformasi

MASA ORDE LAMA	MASA ORDE BARU	MASA REFORMASI
1. Kepemimpinan Soekarno, tahun 1945 – 1968	1. Kepemimpinan Soeharto, tahun 1966 – 1998	1. Kepemimpinan BJ. Habibie – Joko Widodo
2. Pemilu di adakan 1 (satu) kali pada tahun 1955	2. Pemilu di adakan 6 (enam) kali, pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997	2. Masa reformasi menggunakan dasar UU No. 3 tahun 1999.
3. Jumlah peserta pemilu anggota DPR diikuti 118	3. Pemilihan Umum 5 Juli 1971	3. Peserta pemilu sebanyak 48 partai politik

<p>peserta, terdiri dari 36 partai politik (parpol), 34 organisasi kemasyarakatan, dan 48 perorangan. Sedangkan untuk Pemilu anggota Konstituante diikuti oleh 91 peserta yang terdiri dari 39 parpol, 23 organisasi kemasyarakatan dan 29 peserta perseorangan.</p> <p>4. Partai Politik pada Pemilu 1955 antara lain : Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Islam Masjumi, Partai Buruh Indonesia, Partai Rakyat Djelata, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Sosialis Indonesia, Partai Rakyat Sosialis, Partai Katholik Republik Indonesia (PKRI), Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia, Partai Sosialis dan Partai Nasional Indonesia (PNI).</p> <p>5. Dalam undang-undang nomor 3 tahun 1999 tentang pemilihan umum dalam bagian menimbang butir a sampai c disebutkan : Bahwa berdasarkan undang-undang dasar 1945, negara republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat</p> <p>6. Pemilu diadakan untuk memilih Anggota DPR dan anggota konstituante, sedangkan presiden menjabat seumur hidup</p> <p>7. Situasi politik masih belum stabil dan masih ada tekanan dari pihak luar</p> <p>8. Pemilu lebih bersifat demokratis, hingga dana kampanye juga di kumpulkan melalui iuran warga.</p> <p>9. Pemilu berjalan secara lancar, jujur, dan adil, hingga Indonesia mendapat pujian dari beberapa pihak termasuk negara</p>	<p>untuk pemilihan anggota DPR dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional) Terdapat 10 parpol yang mengikuti pemilu tersebut, antara lain : Partai Nadhalatul Ulama, Partai Muslim Indonesia, Partai Serikat Islam Indonesia, Persatuan Tarbiyah Islamiah, Partai Nasionalis Indonesia, Partai Kristen Indonesia, Partai Katholik, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Partai Murba dan Sekber Golongan Karya.</p> <p>4. Pemilihan Umum 2 Mei 1977. Pemilu ini masih menggunakan sistem yang serupa dengan Pemilu 1971 yaitu, perwakilan berimbang (propporsional). Terjadi fusi (peleburan) partai politik peserta Pemilu 1971, sehingga hanya diikuti 3 peserta, yaitu :</p> <p>a. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan faksi dari Partai NU, Parmusi, Perti, dan PSSI.</p> <p>b. Partai Golongan Karya (GOLKAR)</p> <p>c. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan faksi dari PNI, Parkindo, Partai Katolik, partai IPKI dan Partai Murba.</p> <p>5. Pemilu pada 4 Mei 1982. Sistem yang digunakan pada pemilu ketiga Masa Orde Baru masih serupa dengan Pemilu dua periode sebelumnya. Jumlah peserta pada Pemilu ke-3 ini juga masih berjumlah tiga peserta yang sama, yaitu PPP, Golkar, dan juga PDIP.</p> <p>6. Pemilihan Umum 23 April 1987. Tidak ada perbedaan yang terlihat pada Pemilu tahun 1987 karena sistem yang digunakan serta peserta parpol yang sama, yaitu PPP, Golkar, dan PDIP.</p> <p>7. Pemilihan Umum pada 9 Juni 1992. Sistem yang digunakan</p>	<p>4. Pengawasan pelaksanaan pemilu dilakukan pemerintah melalui Bawaslu yang terdiri dari panwaslu, LSM, dan rector UNFREL.</p> <p>5. Pemilu di adakan pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014, 2019</p> <p>6. Pemilu pada tanggal 7 Juni 1999 yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Pemilu 1999 menjadi awal kebangkitan demokrasi yang terbukti melalui jumlah peserta yang ikut dalam pemilihan. Terdapat 48 Partai Politik menjadi peserta pemilu saat itu.</p> <p>7. Pemilu 2004 secara serentak dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004 untuk memilih 550 anggota DPR, 128 Anggota DPD serta DPRD periode 2004-2009. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan pada 5 Juli 2004 (putaran I) dan 20 September 2004 (putaran II). Sistem yang digunakan pada pemilu 2004 adalah perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem daftar calon terbuka. Peserta Pemilu untuk calon anggota DPR, DPD, serta DPRD diikuti sebanyak 48 partai politik. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden terdapat 5 peserta pada putaran I dan hanya ada 2 pasangan yang lolos pada putaran ke-2 yaitu, Megawati Soekarnoputri yang berpasangan dengan K.H Ahmad Hasyim Muzadi dan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Jusuf Kalla.</p> <p>8. Pemilihan Umum diselenggarakan serentak pada tanggal 9 April 2009 untuk memilih 560 anggota DPR, 132 anggota DPD serta DPRD se-Indonesia periode 2009-2014. Sedangkan untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan pada 8 Juli 2009 yang hanya berlangsung satu putaran.</p> <p>Peserta pemilu anggota DPR,</p>
---	---	--

	<p>belum mengalami perubahan yaitu sistem perwakilan berimbang (porporisional) dengan peserta yang masih serupa dengan pemilihan umum sebelumnya, yaitu PPP, Golkar dan PDIP</p> <p>8. Pemilihan Umum pada 29 Mei 1997. Belum terjadi perubahan pada sistem pemilihan dan juga peserta pemilihan. Parpol yang mengikuti pemilu 1997 adalah PPP, Golkar dan PDIP.</p> <p>9. Semboyan pemilu orde baru adalah Luber yaitu Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia dan JURDIL yaitu Jujur dan Adil</p> <p>10. Pengawasan pelaksanaan pemilu dilakukan pemerintah melalui Bawaslu</p>	<p>DPD dan DPRD tahun 2009 diikuti oleh 44 Partai Politik (Parpol), yang terdiri dari 38 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh.</p> <p>Sedangkan untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, terdiri dari 3 pasangan calon , yaitu, Pasangan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto, Pasangan SBY dan Boediono, serta Jusuf Kalla yang berpasangan dengan Wiranto.</p> <p>9. Pemilu dilaksanakan serentak pada tanggal 9 April 2014 untuk memilih 560 anggota DPR dan 132 anggota DPD serta DPRD se-Indonesia periode 2014-2019. Tiga bulan setelah penyelenggaraan Pemilu legislatif, tepatnya tanggal 9 Juli 2014 pemilihan umum untuk presiden dan wakil presiden dilaksanakan.</p> <p>Terdapat sepuluh partai politik yang mengikuti Pemilu 2014, yaitu : Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (Nasdem) serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Selain itu, terdapat dua pasangan peserta yang mengikuti pemilu 2014, yaitu Joko Widodo dengan Jusuf Kalla melawan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.</p> <p>10. Pemilihan Umum 7 April 2019 untuk memilih 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 136 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2019–2024.</p>
--	--	--

		<p>Pemilu legislatif tahun 2019 bersamaan dengan Pemilihan umum Presiden Indonesia 2019. Terdapat 20 partai yang ikut dalam peserta pemilu 2019. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasdem, Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Berkarya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrat, Partai Aceh (PA) Partai politik lokal Aceh yaitu Partai Sira, Partai Daerah Aceh (PD Aceh), Partai Nanggroe Aceh (PNA), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia).</p> <p>11. Partai yang lolos <i>Parlementary Treshold</i> (PT) ada 9 (sembilan) partai 4% yaitu PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, PKS, Nasdem, Demokrat, PAN dan PPP</p> <p>12. Berdasarkan Pasal 202 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 2,5% dari jumlah suara sah secara nasional dan hanya diterapkan dalam penentuan perolehan kursi DPR dan tidak berlaku untuk DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota. Ketentuan ini diterapkan pada Pemilu 2009</p> <p>13. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 3,5% dan berlaku nasional untuk semua anggota DPR dan DPRD. Setelah digugat oleh 14 partai politik. Mahkamah Konstitusi kemudian menetapkan ambang batas 3,5% tersebut hanya berlaku untuk DPR dan ditiadakan untuk</p>
--	--	--

		DPRD. Ketentuan ini direncanakan akan diterapkan sejak Pemilu 2014. 14. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun Tahun 2017, ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 4% dan berlaku nasional untuk semua anggota DPR
--	--	---

Sumber : Data diolah penulis (2022)

Konseptualisasi Teori David Easton dikaitkan dengan pemilu

Pada variabel *input* dalam hal ini adalah partai politik. Partai politik yang ikut dalam kontestasi pemilu dari masa orde lama sampai orde baru sangat beragam. Sejak masa orde baru, peserta pemilu pada tahun 1955 Jumlah peserta pemilu anggota DPR diikuti 118 peserta, terdiri dari 36 partai politik, 34 organisasi kemasyarakatan, dan 48 perorangan. Sedangkan untuk Pemilu anggota Konstituante diikuti oleh 91 peserta yang terdiri dari 39 parpol, 23 organisasi kemasyarakatan dan 29 peserta perseorangan. Hal ini menjadi semakin beragam seiring perkembangan dan pergantian kepemimpinan dari masa orde lama sampai ke reformasi. Tercatat dari beberapa partai yang ikut dalam kontestasi pemilu, partai yang masuk dan lolos dalam peserta pemilu merupakan partai besar dan mewakili dari komunitas masyarakat. Misalnya, partai yang bernuansa Islam di wakili oleh PKB, PPP, PKS serta partai-partai yang lain yang sudah memiliki basis konstituennya masing-masing.

Pemilu pada masa orde baru, diadakan sebanyak 6 (enam) kali dengan status jabatan presiden seumur hidup. Pemilu dimasa orde baru lebih unik, karena pada pemilu tahun 1997 peserta partai politik hanya ada ada 3 (tiga) yaitu PPP, Golkar dan PDIP. Dimana partai Golkar masih tetap berada pada peringkat atas dibanding dua partai lainnya. Sedangkan Pemilu di era reformasi, yang ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto pada tahun 1997, pemilu telah di adakan sebanyak 5 (lima) kali. Pada pemilu era reformasi ini, multi partai bermunculan tetapi tidak diikuti dengan peningkatan kesadaran politik masyarakat. Hal ini disebabkan oleh banyaknya parpol yang bertarung tidak berdasarkan pada platform bagaimana negeri ini menjadi negeri yang bermartabat, sejahtera, modern dan demokratis. Sehingga hasilnya adalah demokrasi yang tumpul yang hanya bermanfaat bagi penguatan birokrasi dan pelipatgandaan kekayaan bagi pejabat anti rakyat.

Pada variabel yang dipengaruhi oleh lingkungan, tuntutan dan dukungan dalam hal ini adalah rakyat Indonesia yang akan menyampaikan hak suara bagi para pemimpin di parlemen bahkan sampai pada pemimpin negara. Konstituen menyampaikan dukungan kepada calon pemimpin jika tuntutan yang mereka sampaikan dapat direalisasikan dengan baik saat mereka mendapatkan kursi di legislatif. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi dalam pencalonan. Misalnya, calon anggota legislatif yang memiliki *background* sebagai pengusaha, tokoh masyarakat, *public figure* memiliki basis konstituen yang beragam. Bahkan kesempatan terbuka lebar bagi seluruh rakyat Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk dapat mencalonkan diri sebagai calon anggota dan baik ditingkat kabupaten, provinsi bahkan legislatif.

Variabel terakhir adalah *output* dimana keputusan, tindakan bahkan lingkungan masih memiliki pengaruh. *Output* dari pemilu dimasa orde lama sampai orde baru melahirkan pemimpin negara yakni, Presiden pertama H. Soekarno,

Presiden kedua H. M. Soeharto, Presiden ketiga Bacharuddin Yusuf Habibie, Presiden keempat Abdurrahman Wahid, Presiden ke lima Megawati Soekarno Putri, Presiden ke enam Susilo Bambang Yudoyono dan Presiden ke tujuh Joko Widodo. Dari variable *input* – sistem – *output* memiliki keterkaitan antara satu dan lainnya melalui *feedback*. Sumber daya manusia yang dimiliki, sistem yang dibuat dan output hasil pemilu yang dihasilkan merupakan peristiwa sejarah bagi bangsa Indonesia untuk membawa perubahan kearah yang lebih baik.

Pemilu tahun 2019 adalah sejarah dan perhelatan akbar di Indonesia. Karena untuk pertama kalinya dilaksanakan pemilihan anggota legislatif, anggota senator dan presiden. Pada pemilihan umum Presiden 2019, Partai Gerindra kembali mengusung ketua dewan pembina Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebagai calon presiden dan wakil presiden bersama partai lainnya yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur. Kemudian kandidat lainnya adalah Joko Widodo dan Ma'ruf Amin yang diusung melalui Koalisi Indonesia Kerja. Pada akhirnya, pemilihan umum dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo - Ma'ruf Amin dengan perolehan suara 55,50%, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan perolehan suara 44,50%. Hasil dari pemilihan umum diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 2019 dini hari. Namun hasil tersebut, tidak diterima oleh Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi karena dianggap penuh dengan ketidakadilan, kecurangan, dan kesewenang-sewenangan. Untuk itu, tim BPN Prabowo-Sandi mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres kepada Mahkamah Konstitusi.

Hasil keputusan Mahkamah Konstitusi disampaikan pada tanggal 27 Juni 2019 dan menyatakan bahwa hakim menolak seluruh gugatan permohonan dari pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Konflik pemilu tahun 2019 sempat menjadi polemik yang ditenggarai menjadi pemicu kerusuhan pada 22 Mei 2019.

KESIMPULAN

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, beberapa dekade belakangan ini semakin mengalami perkembangan dalam proses berdemokrasi, terutama pasca runtuhnya era orde baru yang kemudian melahirkan sebuah perubahan yaitu era reformasi. Dalam konteks demokrasi di Indonesia yang tidak terlepas dari kontestasi pemilihan umum, baik itu pemilihan Presiden dan wakil presiden, maupun pemilihan anggota legislatif, hubungan erat antara media dan partai politik tentu tidak bisa terelakkan. Perkembangan demokrasi di Indonesia, telah membangun warna dan peta politik di Indonesia. Multi partai yang dianut dalam sistem demokrasi Indonesia telah mewarnai demokrasi di mana beberapa partai ikut dalam kegiatan politik berlaga dalam pemilihan umum, berkoalisi, bahkan menjadi oposisi dari pemerintah. Rangkaian peristiwa pemilihan umum yang telah terlaksana dari era orde lama, orde baru sampai reformasi melahirkan satu tujuan yang sama, yakni mewujudkan kesejahteraan dan pembangunan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, Miriam. 1991. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pusaka Utama
- Huda, Ni'matullah., Nasef, Imam. 2017. *Penataan Demokrasi & Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta : Kencana
- Janedjri M. Gaffar. 2013. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Jakarta : Konstitusi Press
- Maksudi, Beddy Iriawan. 2013. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Komara, Endang. (2015). Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi. (<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/SOSIO-FITK/article/view/2814/pdf>, diakses 28 Mei 2022)
- Pureklolon T. Thomas. 2016. *Komunikasi Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Santoso, Topo., Budhiati, Ida. 2019. *Pemilu Di Indonesia. Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan*. Jakarta : Sinar Grafika
- Website Komisi Pemilihan Umum (KPU) : <https://www.kpu.go.id>